




QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019;

Mengingat 

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-*..*

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);
15. Peraturan..

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

27. Peraturan..

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
31. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4);
32. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);

33. Qanun..

33. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 8);
34. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 27);
36. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 38);
37. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 21);
38. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015 tentang sistem Akuntansi Pemerintah Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. laporan Realisasi Anggaran;
- b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. neraca;
- d. laporan Operasional
- e. laporan Arus Kas;
- f. laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp	1.047.978.654.055,02
b. Belanja dan Transfer.....	Rp	1.022.726.512.471,10
Surplus/(Defisit).....	Rp	25.252.141.583,92
c. Pembiayaan:		
1. Penerimaan.....	Rp	80.398.080.985,88
2. Pengeluaran.....	Rp	1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto.....	Rp	79.398.080.985,88
d. Sisa perhitungan Tahun Anggaran 2019....	Rp	104.650.222.569,80

Pasal 3....

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp48.781.759.734,02) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan.....	Rp	999.196.894.321,00
2. Realisasi.....	Rp	1.047.978.654.055,02
Selisih lebih.....	Rp	<u>(48.781.759.734,02)</u>

b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp55.868.462.835,78 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan.....	Rp	1.078.594.975.306,88
2. Realisasi.....	Rp	1.022.726.512.471,10
Selisih kurang.....	Rp	<u>55.868.462.835,78</u>

c. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(104.650.222.569,80) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran surplus defisit setelah perubahan.....	Rp	(79.398.080.985,88)
2. Realisasi.....	Rp	25.252.141.583,92
Selisih lebih.....	Rp	<u>(104.650.222.569,80)</u>

d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan.....	Rp	80.398.080.985,88
2. Realisasi.....	Rp	80.398.080.985,88
Selisih kurang.....	Rp	<u>0,00</u>

e. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan.....	Rp	1.000.000.000,00
2. Realisasi.....	Rp	1.000.000.000,00
Selisih kurang.....	Rp	<u>0,00</u>

f. Selisih...

f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan.....Rp	79.398.080.985,00
2. Realisasi.....Rp	79.398.080.985,00
Selisih lebih.....Rp	<u>0,00</u>

g. Realisasi sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2019 sebesar Rp104.650.222.569,80.

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah SILPA/SIKPA.....Rp	104.650.222.569,80
b. Jumlah Lain-lain.....Rp	0,00
c. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir.....Rp	104.650.222.569,80

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset.....Rp	1.831.494.076.674,93
b. Jumlah Kewajiban.....Rp	856.884.772,67
c. Jumlah Ekuitas.....Rp	1.830.637.191.902,26

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan LO.....Rp	912.532.687.790,22
b. Jumlah Beban LO.....Rp	791.234.922.266,66
c. Surplus/Defisit Kegiatan Operasi.....Rp	121.288.765.523,57
d. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasi Rp	(5.431.413.372,20)
e. Pos Luar Biasa.....Rp	(302.352.000,00)
Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2019..Rp	<u>115.555.000.151,37</u>

Pasal 7....

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas.....	Rp	80.398.080.985,88
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	Rp	230.268.824.392,02
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non:		
Keuangan.....	Rp	(206.016.682.808,10)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan.....	Rp	(0,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Investasi non		
Anggaran.....	Rp	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2019.....	Rp	<u>80.398.080.985,88</u>

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal.....	Rp	1.644.419.040.933,76
b. Surplus/Defisit LO.....	Rp	115.555.000.151,37
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan:		
/Kesalahan Mendasar.....	Rp	70.663.150.817,14
d. Ekuitas Akhir.....	Rp	<u>1.830.637.191.902,26</u>

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran pendapatan daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : LPE;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

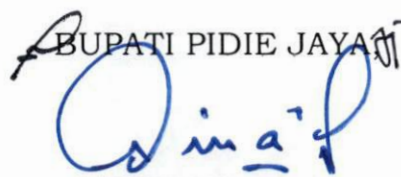
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 24 September 2020 M
7 Shafar 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 24 September 2020 M
7 Shafar 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,


JAILANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH: 4/53/2020

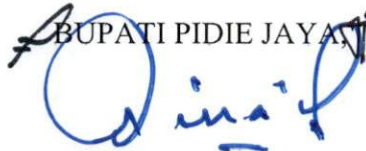
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO	URAIAN	(Dalam Rupiah)			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	%
		2019	2019	2018 Audited	
1	2	3	4	5	6 = 4/3
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	6.480.000.000,00	8.881.422.574,00	7.676.212.368,00	137,06
4	Pendapatan Retribusi Daerah	46.665.349.704,00	40.757.886.376,83	30.351.516.306,85	87,34
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.790.000.000,00	2.511.930.606,00	2.268.865.072,00	90,03
6	Pendapatan Zakat	3.000.000.000,00	3.045.789.435,90	3.067.758.862,00	101,53
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.259.728.955,00	13.633.699.485,48	14.068.462.176,12	89,34
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 7)	74.195.078.659,00	68.830.728.478,21	57.432.814.784,97	92,77
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	9.069.294.000,00	6.964.223.205,00	8.507.844.748,00	76,79
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.131.542.000,00	4.036.099.873,00	3.553.182.577,00	78,65
13	Dana Alokasi Umum	441.952.256.000,00	441.952.256.000,00	420.639.477.000,00	100,00
14	Dana Alokasi Khusus	166.047.898.456,00	157.835.812.670,00	177.314.380.841,00	95,05
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	622.200.990.456,00	610.788.391.748,00	610.014.885.166,00	98,17
16	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
17	Dana Penyesuaian	176.461.115.000,00	176.461.115.000,00	151.154.709.000,00	100,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (17)	176.461.115.000,00	176.461.115.000,00	151.154.709.000,00	100,00
19	PENDAPATAN BANTUAN KEUANGAN				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.170.916.224,00	22.897.614.846,81	21.324.989.807,54	113,52
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20)	20.170.916.224,00	22.897.614.846,81	21.324.989.807,54	113,52
22	PENDAPATAN BANTUAN KEUANGAN				
23	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	87.452.993.982,00	87.452.993.982,00	0,00	100,00
24	Jumlah Bantuan Keuangan (23)	87.452.993.982,00	87.452.993.982,00	0,00	100,00
25	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER (15+18+21+24)	906.286.015.662,00	897.600.115.576,81	782.494.583.973,54	99,04
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
27	Pendapatan Hibah	18.715.800.000,00	81.547.810.000,00	13.862.160.000,00	435,72
28	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (27 s/d 29)	18.715.800.000,00	81.547.810.000,00	13.862.160.000,00	435,72
31	JUMLAH PENDAPATAN (8+25+30)	999.196.894.321,00	1.047.978.654.055,02	853.789.558.758,51	104,88
32	BELANJA				
33	BELANJA OPERASI				
34	Belanja Pegawai	328.225.610.995,00	305.011.029.818,00	291.877.879.307,00	92,93
35	Belanja Barang	244.717.577.939,00	225.283.373.124,00	191.436.120.941,00	92,06
36	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Hibah	45.638.305.204,00	44.652.562.224,00	78.001.873.118,00	97,84
39	Belanja Bantuan Sosial	32.365.941.100,00	30.005.808.030,00	259.516.770.000,00	92,71
40	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Jumlah Belanja Operasi (34 s/d 40)	650.947.435.238,00	604.952.773.196,00	820.832.643.366,00	92,93
42	BELANJA MODAL				
43	Belanja Tanah	196.170.000,00	196.170.000,00	431.512.040,00	100,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin	48.146.245.126,00	43.166.896.119,00	14.294.003.333,00	89,66
45	Belanja Bangunan dan Gedung	55.571.471.627,00	53.653.840.076,00	48.191.343.925,00	96,55
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	104.910.438.232,00	103.921.814.806,10	112.905.028.620,00	99,06
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.234.720.620,00	4.077.961.807,00	3.099.526.686,00	96,30
48	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Jumlah Belanja Modal (43 s/d 48)	213.059.045.605,00	205.016.682.808,10	178.921.414.604,00	96,23
50	BELANJA TAK TERDUGA				
51	Belanja Tak Terduga	2.086.929.613,88	302.352.000,00	196.691.661,00	14,49
52	Jumlah Belanja Tidak Terduga (51)	2.086.929.613,88	302.352.000,00	196.691.661,00	14,49
53	JUMLAH BELANJA (41+49+52)	866.093.410.456,88	810.271.808.004,10	999.950.749.631,00	93,55
54	TRANSFER				
55	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
56	Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bagi Hasil Retribusi Ke Kabupaten/Kota/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	212.001.566.100,00	211.981.566.100,00	194.595.709.000,00	99,99
59	Transfer/Bantuan Keuangan Lainnya	499.998.750,00	473.138.367,00	1.619.968.550,00	94,63
60	JUMLAH TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN (56 s/d 59)	212.501.564.850,00	212.454.704.467,00	196.215.677.550,00	99,98
61	SURPLUS/(DEFISIT) (32-54-61)	(79.398.080.985,88)	25.252.141.583,92	(342.376.868.422,49)	(31,80)

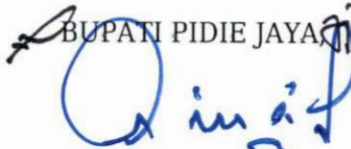
62	PEMBIAYAAN				
63	PENERIMAAN DAERAH				
64	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	80.398.080.985,88	80.398.080.985,88	423.790.444.408,37	100,00
65	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Jumlah Penerimaan (64 s/d 68)	80.398.080.985,88	80.398.080.985,88	423.790.444.408,37	100,00
70	PENGELUARAN DAERAH				
71	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	15.495.000,00	0,00
74	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Jumlah Pengeluaran (70 s/d 74)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.015.495.000,00	99,95
76	PEMBIAYAAN NETTO (69-75)	79.398.080.985,88	79.398.080.985,88	422.774.949.408,37	
77	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) (61 + 76)	0,00	104.650.222.569,80	80.398.080.985,88	


 BUPATI PIDIE JAYA
 AIYUB BIN ABBAS

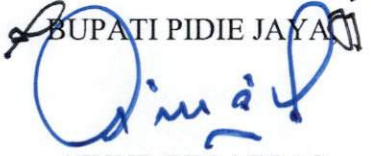
KODE	URAIAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	
				JUMLAH	%
2.07.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	11,267,717,494.00	7,099,973,688.00	(4,167,743,806.00)	63.01
05	Lingkungan Hidup	9,945,113,495.00	9,324,006,228.00	(621,107,267.00)	93.75
1.08.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	9,945,113,495.00	9,324,006,228.00	(621,107,267.00)	93.75
06	Perumahan dan fasilitas umum	280,494,695,973.00	262,513,282,930.98	(17,981,413,042.02)	93.59
1.02.01.00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	110,836,839,033.00	101,960,747,141.00	(8,876,091,892.00)	91.99
1.02.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	63,285,190,697.00	56,026,256,391.00	(7,258,934,306.00)	88.53
1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum	106,372,666,243.00	104,526,279,398.98	(1,846,386,844.02)	98.26
10	Pendidikan	236,273,935,990.00	222,403,288,219.00	(13,870,647,771.00)	94.13
1.01.01.00	Dinas Pendidikan	208,574,602,208.00	196,185,719,720.00	(12,388,882,488.00)	94.06
1.01.03.00	TK/SD	12,932,728,500.00	12,457,669,400.00	(475,059,100.00)	96.33
1.01.04.00	SMP	6,471,575,785.00	5,763,944,785.00	(707,631,000.00)	89.07
1.01.06.00	Cabang Dinas Pendidikan	104,646,000.00	103,196,160.00	(1,449,840.00)	98.61
1.18.01.00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	8,190,383,497.00	7,892,758,154.00	(297,625,343.00)	96.37
11	Perlindungan Sosial	15,490,554,558.00	14,438,419,798.00	(1,052,134,760.00)	93.21
1.10.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,513,749,023.00	4,178,746,078.00	(335,002,945.00)	92.58
1.13.01.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10,976,805,535.00	10,259,673,720.00	(717,131,815.00)	93.47
	JUMLAH	1,078,594,975,306.88	1,022,726,512,471.10	(55,868,462,835.78)	94.82

BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BELANJA									
		REALISASI (Rp)								LEBIH/ (KURANG)	
		BELANJA BUNGA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA BAGI HASIL	BEL.BANTUAN KEU.KAB/KOTA	BELANJA TIDAK TERDUGA	JUMLAH	(Rp)	%
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28=18+s.d+27	29=28-17	30=28/17
2.07	Perindustrian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,586,092,738.00	(4,323,624,756.00)	63.70
2.07.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,586,092,738.00	(4,323,624,756.00)	63.70
2.08	Transmigrasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	0.00	0.00	4,052,843,000.00	27,708,125,000.00	0.00	212,454,704,467.00	302,352,000.00	1,022,726,512,471.10	(55,868,462,835.78)	94.82

BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS

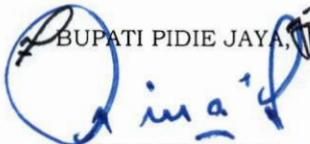
KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH	JENIS BELANJA						TOTAL BELANJA		LEBIH/(KURANG)	
		PEGAWAI		BARANG DAN JASA		MODAL		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI				
	JUMLAH	25,586,714,200.00	24,166,149,467.00	288,263,024,243.00	268,180,775,378.00	213,059,045,605.00	205,016,682,808.10	526,908,784,048.00	497,363,607,653.10	(29,545,176,394.90)	94.39


 BUPATI PIDIE JAYA
 AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

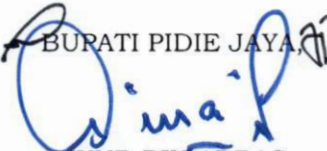
KABUPATEN PIDIE JAYA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Per 31 Desember Tahun 2019 dan 2018

No	URAIAN	2019	2018
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	80.398.080.985,88	423.790.444.408,37
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	80.398.080.985,88	423.790.444.408,37
3	Subtotal (1-2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	104.650.222.569,80	80.398.080.985,88
5	Subtotal (3+4)	104.650.222.569,80	80.398.080.985,88
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	104.650.222.569,80	80.398.080.985,88

BUPATI PIDIE JAYA,

 AIYUB BIN ABBAS

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2019	2018
		Audited	Audited
	KEGIATAN OPERASIONAL		
1	PENDAPATAN		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
3	Pendapatan Pajak Daerah	9.378.154.015,00	8.070.274.344,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	47.055.957.049,16	30.351.516.306,85
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.511.930.606,00	2.268.865.072,00
6	Pendapatan Zakat	3.045.789.435,90	3.067.758.862,00
7	Lain-lain PAD yang Sah	13.827.723.663,13	14.068.462.176,12
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 7)	75.819.554.769,19	57.826.876.760,97
9	PENDAPATAN TRANSFER		
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN		
11	Dana Bagi Hasil Pajak	8.432.548.695,00	8.507.844.748,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.438.092.448,00	3.553.182.577,00
13	Dana Alokasi Umum	441.952.256.000,00	420.639.477.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	157.835.812.670,00	177.314.380.841,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	613.658.709.813,00	610.014.885.166,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA		
17	Dana Penyesuaian	10.664.040.000,00	151.154.709.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (17)	10.664.040.000,00	151.154.709.000,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.976.540.844,81	21.324.989.807,54
21	Pendapatan Otonomi Khusus	0,00	0,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	29.976.540.844,81	21.324.989.807,54
23	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	741.752.284.639,81	782.494.583.973,54
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
25	Pendapatan Hibah	94.960.848.381,22	14.123.285.000,00
26	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
27	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	87.452.993.982,00	0,00
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)	182.413.842.363,22	14.123.285.000,00
29	JUMLAH PENDAPATAN (8+23+28)	999.985.681.772,22	854.444.745.734,51
30	BEBAN		
31	Beban Pegawai	305.013.529.818,00	289.122.192.407,00
32	Beban Persediaan	40.189.650.538,00	53.290.603.022,00
33	Beban Jasa	116.239.528.989,00	95.081.389.632,00
34	Beban Pemeliharaan	8.891.376.619,00	9.532.364.278,00
35	Beban Perjalanan Dinas	21.757.458.127,00	20.452.330.864,00
36	Beban Bunga	0,00	0,00
37	Beban Subsidi	0,00	0,00
38	Beban Hibah	83.773.235.429,00	77.019.620.361,00
39	Beban Bantuan Sosial	30.005.808.030,00	259.516.770.000,00
40	Beban Penyusutan dan Amortisasi	129.612.313.276,46	117.764.730.233,39
41	Beban Penyisihan Piutang	7.200.298.088,20	6.438.028.565,22
42	Beban Transfer	46.657.629.467,00	196.215.677.550,00
43	Beban Penghapusan Aset	0,00	0,00
44	Beban Hibah Aset	0,00	0,00
45	Beban Lain-lain	1.903.093.885,00	930.129.811,00
46	Beban Hibah Dana Bos	0,00	10.102.068.289,00
47	Jumlah Beban (31 s/d 46)	791.243.922.266,66	1.135.465.905.012,61
48	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (29-47)	121.288.765.523,57	(281.021.159.278,10)
49	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
50	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASI		
51	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
52	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
53	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
54	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
55	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
56	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(5.431.413.372,20)	(65.166.661,14)
57	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi (51 s/d 56)	(5.431.413.372,20)	(65.166.661,14)
58	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	115.857.352.151,37	(281.086.325.939,24)
59	POS LUAR BIASA		
60	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
61	Beban Luar Biasa	302.352.000,00	196.691.661,00
62	Pos Luar Biasa (60 s/d 61)	(302.352.000,00)	(196.691.661,00)
63	SURPLUS/DEFISIT-LO (58 + 62)	115.555.000.151,37	(281.283.017.600,24)


 BURATI PIDIE JAYA
 AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN IV : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

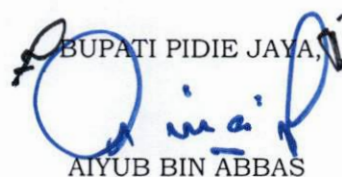
NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dan Tahun 2018

NO	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	EKUITAS AWAL	1.644.419.040.933,76	1.947.002.993.524,99
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	115.555.000.151,37	(281.283.017.600,24)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	70.663.150.817,14	(21.300.934.990,99)
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	441.184.220,00
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
6	LAIN LAIN	70.663.150.817,14	(21.742.119.210,99)
7	EKUITAS AKHIR	1.830.637.191.902,26	1.644.419.040.933,76


 BUPATI PIDIE JAYA,
 AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

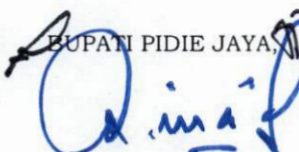
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2019	2018
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	104.643.022.569,80	80.398.080.985,88
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
5	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	7.200.000,00	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	10.000,00
7	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
8	Piutang Pajak	6.952.712.929,00	6.149.237.622,00
9	Piutang Retribusi	20.339.947.939,00	0,00
10	Piutang Sewa	0,00	0,00
11	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Propinsi	7.078.925.998,00	0,00
12	Piutang Lainnya	2.763.762.653,63	2.569.176.376,94
13	Penyisihan Piutang	(7.200.298.088,20)	(6.438.028.565,22)
14	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
15	Persediaan	13.146.408.318,00	15.559.691.336,00
16	JUMLAH ASET LANCAR (3 s/d 15)	150.602.000.384,23	98.238.157.755,60
17	INVESTASI JANGKA PANJANG		
18	Investasi Non Permanen		
19	Investasi Non permanen Lainnya	0,00	0,00
20	Jumlah Investasi Non Permanen (19)	0,00	0,00
21	Investasi Permanen		
22	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	46.950.833.604,50	11.000.000.000,00
23	Jumlah Investasi Permanen (22)	46.950.833.604,50	11.000.000.000,00
24	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	46.950.833.604,50	11.000.000.000,00
25	ASET TETAP		
26	Tanah	128.231.784.643,71	134.694.548.259,00
27	Peralatan dan Mesin	267.845.393.674,67	228.989.197.715,51
28	Gedung dan Bangunan	635.322.904.100,00	588.607.386.003,00
29	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.272.085.615.568,16	1.162.227.164.707,00
30	Aset Tetap Lainnya	33.773.553.809,85	29.695.592.002,85
31	Konstruksi dalam Pengerjaan	16.838.381.894,00	13.526.128.894,00
32	Akumulasi Penyusutan	(733.047.663.726,19)	(610.082.812.992,20)
33	Jumlah Aset Tetap (26 s/d 32)	1.621.049.969.964,20	1.547.657.204.589,16
34	DANA CADANGAN		
35	Dana Cadangan	0,00	0,00
36	Jumlah Dana Cadangan (32)	0,00	0,00
37	ASET LAINNYA		
38	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
39	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
40	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
41	Aset Tak Berwujud	3.819.340.000,00	3.442.671.000,00
42	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.094.346.750,00)	(2.718.983.000,00)
43	Aset Lain-lain	19.716.093.192,00	890.806.192,00
44	Jumlah Aset Lainnya (38 s/d 43)	20.441.086.442,00	1.614.494.192,00
45	JUMLAH ASET (16+24+33+44)	1.839.043.890.394,93	1.658.509.856.536,76
46	KEWAJIBAN		
47	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
48	Utang Perhitungan Pihak Ketiga/ Utang Belanja	845.272.106,00	14.090.815.603,00
49	Utang Bunga	0,00	0,00
50	Utang Pajak	0,00	0,00
51	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
52	Pendapatan Diterima Dimuka	11.612.666,67	0,00
53	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
54	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (48 s/d 53)	856.884.772,67	14.090.815.603,00
55	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
56	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00
57	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
58	Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00

59	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
60	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (56 s/d 59)	0,00	0,00
61	JUMLAH KEWAJIBAN (54+60)	856.884.772,67	14.090.815.603,00
62	EKUITAS		
63	Ekuitas	1.830.637.191.902,26	1.644.419.040.933,76
64	Jumlah Ekuitas (63)	1.830.637.191.902,26	1.644.419.040.933,76
65	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (61+64)	1.831.494.076.674,93	1.658.509.856.536,76



 BUPATI PIDIE JAYA,

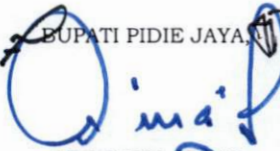
 AIYUB BIN ABBAS

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	URAIAN	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	8.881.422.574,00	7.676.212.368,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	40.758.207.804,00	30.351.516.306,85
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.511.930.606,00	2.268.865.072,00
6	Penerimaan Zakat	3.045.789.435,90	3.067.758.862,00
7	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	13.576.330.506,31	14.068.452.176,12
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	6.964.223.205,00	8.507.844.748,00
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.036.099.873,00	3.553.182.577,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum	441.952.256.000,00	420.639.477.000,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	157.835.812.670,00	177.314.380.841,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Penyesuaian	176.461.115.000,00	151.154.709.000,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	22.897.614.846,81	21.324.989.807,54
15	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi	87.452.993.982,00	-
16	Penerimaan Hibah	81.544.450.000,00	13.862.160.000,00
17	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
18	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
19	Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)	1.047.918.246.503,02	853.789.548.758,51
21	Arus Keluar Kas		
22	Pembayaran Pegawai	305.018.229.818,00	291.877.879.307,00
23	Pembayaran Barang dan Jasa	268.180.452.626,00	242.110.937.768,00
24	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah	4.052.843.000,00	27.327.056.291,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	27.708.125.000,00	259.516.770.000,00
28	Pembayaran Tidak Terduga	302.352.000,00	196.691.661,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	212.454.704.467,00	196.215.677.550,00
30	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
31	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 30)	817.716.706.911,00	1.017.245.012.577,00
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20-31)	230.201.539.592,02	(163.455.463.818,49)
33	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN		
34	Arus Masuk Kas		
35	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
36	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
41	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
42	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
44	Jumlah Arus Masuk Kas (35 s/d 43)	0,00	0,00
45	Arus Keluar Kas		
46	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
47	Perolehan Tanah	196.170.000,00	431.512.040,00
48	Perolehan Peralatan dan Mesin	43.166.896.119,00	14.294.003.333,00
49	Perolehan Gedung dan Bangunan	53.653.840.076,00	48.191.343.925,00
50	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.921.814.806,10	112.905.028.620,00
51	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.077.961.807,00	3.099.526.686,00
52	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 54)	206.016.682.808,10	179.921.414.604,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (44 - 55)	(206.016.682.808,10)	(179.921.414.604,00)
57	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
58	Arus Masuk Kas		
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
62	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
64	Jumlah Arus Masuk Kas (59 s/d 63)	0,00	0,00
65	Arus Keluar Kas		
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	15.495.000,00
69	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00

70	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
71	Jumlah Arus Keluar Kas (66 s/d 70)	0,00	15.495.000,00
72	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 - 71)	0,00	(15.495.000,00)
73	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
74	Arus Masuk Kas		
75	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	41.900.841.225,00	41.906.880.497,00
76	Penerimaan Transito	0,00	0,00
77	Jumlah Arus Masuk Kas (75 s/d 76)	41.900.841.225,00	41.906.880.497,00
78	Arus Keluar Kas		
79	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	41.900.841.225,00	41.906.880.497,00
80	Pengeluaran Transito	0,00	0,00
81	Jumlah Arus Keluar Kas (79 s/d 80)	41.900.841.225,00	41.906.880.497,00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (77 - 81)	0,00	0,00
83	Kenaikan/ Penurunan Kas (32 + 56 + 72 + 82)	24.252.141.583,92	(343.392.373.422,49)
84	Saldo Awal Kas di BUD	80.398.080.985,88	423.790.454.408,37
85	Saldo Akhir Kas di BUD (83 + 84)	104.650.222.569,80	80.398.080.985,88
86	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
87	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
88	Saldo Akhir Kas (85 + 86 + 87)	104.650.222.569,80	80.398.080.985,88



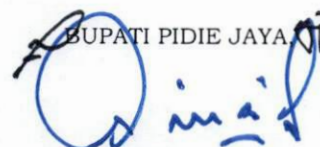
 BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
11	Koreksi atas penerimaan hibah Aset Gedung dan Bangunan dari Provinsi	1.231.475.000,00
12	Koreksi atas penerimaan hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Provinsi	2.478.000.000,00
13	Koreksi atas pencatatan jasa giro Dana BOS	562.099,04
	Jumlah (1 s.d 13)	78.416.135.729,45
B	MUTASI KURANG	
1	Penyesuaian Penyusutan Akibat Atribusi	5.256.060,00
2	Koreksi kurang Catat Akumulasi Penyusutan Pada Kantor Camat Meureudu	45.440.000,00
3	Koreksi kurang Catat Akumulasi Penyusutan pada RSUD	658.054.300,64
4	Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan pada dinas perindustrian perdagangan dan koperasi	62.542.591,00
5	Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan pada Dinas Pekerjaan Umum	45.820.000,00
6	Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	495.600.000,00
7	Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan pada Dinas Lingkungan Hidup	652.205.733,34
8	Koreksi Pembulatan Perhitungan Penyusutan KIB	0,38
9	Koreksi atas pencatatan ganda aset tanah di Kecamatan Ulim	487.200.000,00
10	Koreksi atas salah catat beban perjalanan dinas TA 2018	47.113.020,00
11	Koreksi atas salah catat beban jasa listrik TA 2018	2.085.858.094,00
12	Koreksi atas salah catat beban hibah tanah Setda ke instansi vertikal pada Tahun Anggaran yang Lalu	1.974.546.115,29
13	Koreksi atas salah catat beban hibah tanah BPKK ke instansi vertikal pada Tahun Anggaran yang Lalu	942.600.000,00
14	Penyesuaian Piutang Denda PBB	250.748.997,66
	Jumlah (1 s.d 12)	7.752.984.912,31
	TOTAL A-B	70.663.150.817,14

5.6.2 Ekuitas Akhir

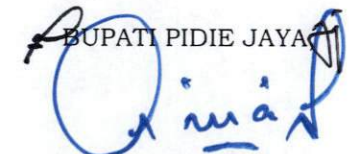
Ekuitas Akhir TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.830.637.191.902,26 dan sebesar Rp1.644.419.040.933,76 dengan demikian menunjukkan bahwa ekuitas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada TA 2019 meningkat sebesar Rp186.218.150.968,50 atau sebesar 11,32%.


 BUPATI PIDIE JAYA
 AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN VIII : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

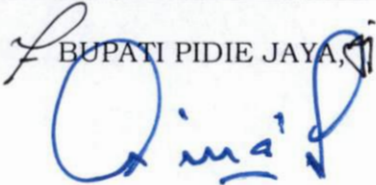
NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUA N PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak		6.149.237.622,00	1.562.415.050,00	758.939.743,00	6.952.712.929,00
2	Piutang Retribusi	2019	-	20.339.947.939,00	-	20.339.947.939,00
3	Piutang Sewa	2019	-	-	449.723.452,00	-
4	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pusat	2019		2.870.318.065,00	-	2.870.318.065,00
5	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Propinsi	2019	-	7.078.925.998,00		7.078.925.998,00
6	Piutang Lainnya		2.569.176.376,94	194.586.276,69	-	2.763.762.653,63
	JUMLAH		8.718.413.998,94	32.046.193.328,69	1.208.663.195,00	40.005.667.584,63

BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN IX : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

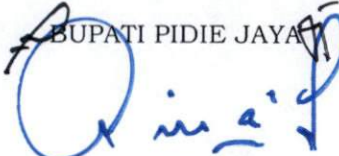
No	Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Nilai Bersih yang dapat direalisasikan
1	2	3	4	5= 3-4
1	Piutang Pajak	6.952.712.929,00	4.791.553.054,70	2.161.159.874,30
2	Piutang Retribusi	20.339.947.939,00	101.699.739,70	20.238.248.199,31
3	Piutang Sewa	-	-	-
4	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pusat	2.870.318.065,00	14.351.590,30	2.855.966.474,70
5	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Propinsi	7.078.925.998,00	35.394.630,00	7.043.531.368,00
6	Piutang Lainnya	2.763.762.653,63	2.257.299.073,51	506.463.580,12
	Jumlah	40.005.667.584,63	7.200.298.088,20	-

BUPATI PIDIE JAYA,

 AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN X : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

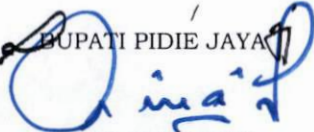
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
 DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Dana Bergulir	Saldo Awal Dana Bergulir	Penambahan Dana Bergulir	Koreksi Pengurangan Dana Bergulir	Penyisihan Dana Bergulir	Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Tahun 216	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			NIHIL					

BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

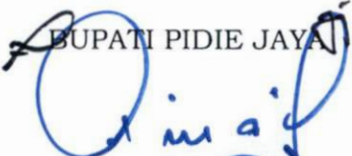
No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
						awal tahun		9=7+8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2019	PT. BANK ACEH SYARIAH	Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2016	Investasi Permanen	12.000.000.000,00	11.000.000.000,00	1.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	2.268.865.072,00	0,00	12.000.000.000,00
2	2019	PDAM Tirta Krueng Meureudu	Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2010	Investasi Permanen	34.950.833.604,00	0,00	34.950.833.604,00	34.950.833.604,00	0,00	0,00	0,00	34.950.833.604,00
Jumlah					46.950.833.604,00	11.000.000.000,00	35.950.833.604,00	46.950.833.604,00	0,00	2.268.865.072,00	0,00	46.950.833.604,00


 BUPATI PIDIE JAYA
 AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN XII : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
 DAFTAR REKAPITULASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

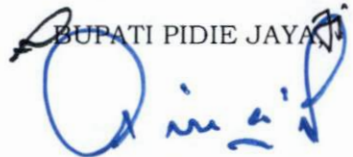
No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tanah	134.694.548.259,00	5.672.537.500,00	12.135.301.115,29	128.231.784.643,71
2	Peralatan dan Mesin	228.989.197.715,51	48.066.374.844,16	9.210.178.885,00	267.845.393.674,67
3	Gedung dan Bangunan	588.607.386.003,00	59.209.080.227,00	12.493.562.130,00	635.322.904.100,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.162.227.164.707,00	151.383.678.432,16	41.525.227.571,00	1.272.085.615.568,16
5	Aset Tetap Lainnya	29.695.592.002,85	4.077.961.807,00	0,00	33.773.553.809,85
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	13.526.128.894,00	3.312.253.000,00	0,00	16.838.381.894,00
7	Akumulasi Penyusutan	(610.082.812.992,20)	(131.201.868.211,82)	(8.237.017.477,83)	(733.047.663.726,19)
	Jumlah	1.547.657.204.589,16	140.520.017.598,50	0,00	1.621.049.969.964,20

BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN XIII : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
 DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
 TAHUN ANGGARAN 2019

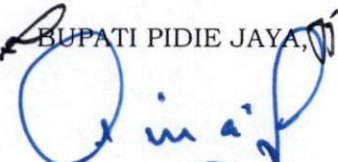
No	Uraian	Saldo Awal Aset Tetap	Saldo Akhir Aset Tetap	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase Kenaikan/Penurunan
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	134.694.548.259,00	128.231.784.643,71	(6.462.763.615,29)	-4,80%
2	Peralatan dan Mesin	228.989.197.715,51	267.845.393.674,67	38.856.195.959,16	16,97%
3	Gedung dan Bangunan	588.607.386.003,00	635.322.904.100,00	46.715.518.097,00	7,94%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.162.227.164.707,00	1.272.085.615.568,16	109.858.450.861,16	9,45%
5	Aset Tetap Lainnya	29.695.592.002,85	33.773.553.809,85	4.077.961.807,00	13,73%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	13.526.128.894,00	16.838.381.894,00	3.312.253.000,00	24,49%
7	Akumulasi Penyusutan	(610.082.812.992,20)	(733.047.663.726,19)	(122.964.850.733,99)	20,16%
	JUMLAH	1.547.657.204.589,16	1.621.049.969.964,20	73.392.765.375,04	4,74%

BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN XIV : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.526.128.894,00	3.312.253.000,00	0,00	16.838.381.894,00
	JUMLAH	13.526.128.894,00	3.312.253.000,00	0,00	16.838.381.894,00

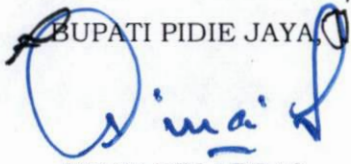
BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN XV : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	ASET LAINNYA				
1,1	Tuntutan ganti rugi reklasifikasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya kepada penyewa Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
2	ASET TAK BERWUJUD	3.442.671.000,00	0,00	0,00	3.442.671.000,00
2.1	Geografic Information Sistem (GIS)	424.600.000	0,00	0,00	424.600.000,00
2.2	Website Sekolah	99.890.000	0,00	0,00	99.890.000,00
2.3	Siadinda	854.300.000	0,00	0,00	854.300.000,00
2.4	Simbakda	285.000.000	0,00	0,00	285.000.000,00
2.5	SIM PBB-P2	198.000.000	0,00	0,00	198.000.000,00
2.6	BPHTB	197.450.000	0,00	0,00	197.450.000,00
2.7	GIS PBB-P2	177.925.000	0,00	0,00	177.925.000,00
2.8	Website BPM	17.820.000	0,00	0,00	17.820.000,00
2.9	Sistem Informasi Pemberdayaan	41.800.000	0,00	0,00	41.800.000,00
2.10	Website Bappeda	10.000.000	0,00	0,00	10.000.000,00
2.11	E-Planning	746.750.000	0,00	0,00	746.750.000,00
2.12	E-Reporting	40.000.000	0,00	0,00	40.000.000,00
2.13	Simpaten	49.990.000	0,00	0,00	49.990.000,00
2.14	Simdes	54.945.000	0,00	0,00	54.945.000,00

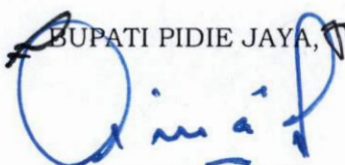
2.15	E-Arsip	20.000.000	0,00	0,00	20.000.000,00
2.16	Sistem Informasi Pelayanan Terpadu	98.175.000	0,00	0,00	98.175.000,00
2.17	Website Pelayanan Penerbitan SPD SKPK	11.100.000	0,00	0,00	11.100.000,00
2.18	SIPTK (Sistem Informasi Pendataan Tenaga Kerja)	24.986.000	0,00	0,00	24.986.000,00
2.19	Penetapan Angka Kredit (PAK)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.20	SIMPADU (Sistem Pelayanan Terpadu)	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
2.21	Lapor ABUWA	49.940.000,00	0,00	0,00	49.940.000,00
3	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	(2.718.983.000,00)	(375.363.750,00)	0,00	(3.094.346.750,00)
4	ASET LAIN-LAIN				
3,1	Reklasifikasi dari Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Berupa Aset Tetap - Peralatan dan Mesin -Kendaraan Roda Dua yang Hilang saat Menjalankan Tugas Kedinasan	890.806.192,00	18.825.287.000,00	0,00	19.716.093.192,00
5	PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	0,00	(7.549.813.720,00)	0,00	(7.549.813.720,00)
JUMLAH		1.614.494.192,00	10.900.109.530,00	0,00	12.514.603.722,00

BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN XVI : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

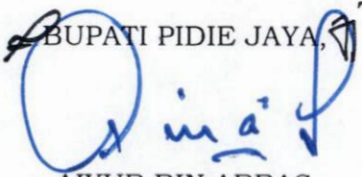
No.	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari kas daerah	Transfer ke kas daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
dst								
Jumlah								

BUPATI PIDIE JAYA,

 AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN XVII : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

KABUPATEN PIDIE JAYA
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Uraian Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Utang Kepada Pihak Ketiga/Utang Belanja				
	- Utang Belanja	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
	- Gedung Serba Guna	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gedung Kantor Pekerjaan Umum	849.885.106,00	0,00	11.813.000,00	838.072.106,00
	- Jalan Pusat Perkantoran Pemkab Pidie Jaya I	4.402.117.988,00	0,00	4.402.117.988,00	0,00
	- Jalan Pusat Perkantoran Pemkab Pidie Jaya II	8.838.812.509,00	0,00	8.838.812.509,00	0,00
	JUMLAH	14.090.815.603,00	7.200.000,00	13.252.743.497,00	845.272.106,00

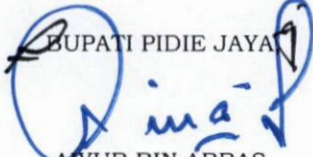
BUPATI PIDIE JAYA,

 AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN XVIII : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

KABUPATEN PIDIE JAYA
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/tahun Perjanjian Pinjaman /Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp./valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman	Jumlah Realisasi		Jumlah Sisa Pembayaran	
							Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)

NIHIL

KABUPATEN PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS

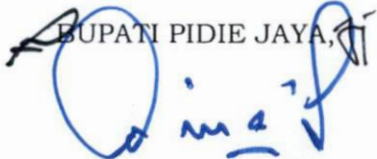
LAMPIRAN XIX : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Realisasi Tahun n 2, Tahun n 1, dan Tahun n			Jumlah Akumulasi Realisasi s.d Tahun n	Jumlah yang Dianggarkan Dalam APBD Tahun Berikutnya
			Realisasi Tahun n 2	Realisasi Tahun n 2	Realisasi Tahun n		
			NIHIL				

BUPATI PIDIE JAYA, 
AIYUB BIN ABBAS